



## "BPJS Kesehatan Mendengar" Ajak *Stakeholders* JKN-KIS Suarakan Aspirasinya

Jakarta (08/03/2021) - Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan *stakeholders* JKN-KIS lainnya. Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program "BPJS Kesehatan Mendengar" guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para *stakeholders* JKN-KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendorong kepuasan peserta JKN-KIS.

"BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan *stakeholders* untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara *Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar*, Senin (08/03).

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan "BPJS Kesehatan Mendengar" menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan *offline* atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan *online*, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.

"Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS," kata Ghufron yang bersama-sama melakukan *Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar* dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, *stakeholders* yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi. Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai *stakeholders*, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

"Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai *stakeholders*, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai *stakeholders*, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN. Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan. Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS," ucap Dante.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut hubungi:

**Humas BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Care Center : 1 500400

Website : [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

### **"BPJS Kesehatan Mendengar" Invites JKN-KIS Stakeholders to Voice Their Aspirations**

Jakarta (08/03/2021) - In order to build an ideal JKN-KIS program ecosystem, BPJS Kesehatan seeks to optimize cross-sectoral synergies with ministries/agencies, local governments, health facility management, medical personnel, employers, health facility associations, professional organizations, academics, experts, and other JKN-KIS stakeholders. For this reason, BPJS Kesehatan created the "BPJS Kesehatan Mendengar" (*trans: BPJS Kesehatan Listens*) Program to gather various constructive inputs and suggestions from the JKN-KIS stakeholders. The purpose is to improve service quality and boost JKN-KIS participant satisfaction.

"BPJS Kesehatan Mendengar helps us to map the needs of stakeholders for evaluation, input, and reference in managing the JKN-KIS program for the next five years. In fact, it is possible that their voices will become BPJS Kesehatan's long-term strategic targets," said the President Director of BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, at the Kick Off Press Conference for BPJS Kesehatan Mendengar, Monday (08/03).

Ghufron explained that the implementation of the "BPJS Kesehatan Mendengar" uses three methods, namely through offline meetings or direct visits to stakeholders, through online meetings, and through e-Forms, which are electronic forms that will be circulated by BPJS Kesehatan to be filled out by stakeholders. The results of these activities will then be compiled and become input for the formulation of an organizational strategy.

"In addition, we will also use this input to develop innovations in order to improve service quality, participant satisfaction and maintain the continuity of the JKN-KIS Program," said Ghufron who jointly conducted BPJS Kesehatan Mendengar Kick Off with the Deputy Minister of Health of the Republic of Indonesia, Dante Saksono Harbuwono and Chairman of the BPJS Kesehatan Supervisory Board, Achmad Yuriyanto.

According to him, based on the mapping carried out by BPJS Kesehatan, the stakeholders who are the top priority to be managed intensively are those who have great authority and high interest in the organization. For example, JKN-KIS participants, health facilities, and government (in this case, ministries/agencies that are directly related to BPJS Kesehatan operations, such as the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, Council National Social Security, Financial Services Authority, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and so on).

Meanwhile, the Director of Supervision, Inspection, and Inter-Institutional Relations of BPJS Kesehatan, Mundiharno, as the director of BPJS Kesehatan Mendengar activities, said that these activities are expected to strengthen better communication between BPJS Kesehatan and various stakeholders. The expected result is to strengthen JKN-KIS ecosystem ahead.

"By establishing good communication with various stakeholders, we hope that JKN-KIS ecosystem can be more conducive and the result is JKN-KIS program can be implemented even better. For this reason, to all levels of BPJS Kesehatan, we emphasize the importance of listening to the public voices; listening with empathy to understand, and not only listening to answer in words. Their thoughts and inputs are very important because the JKN-KIS program is a national program which in its implementation needs support from various stakeholders, both at the central and regional levels," said Mundiharno.

Meanwhile, the Deputy Minister of Health of the Republic of Indonesia, Dante Saksono Harbuwono said, there are a number of efforts that must be made to maintain the sustainability of the JKN-KIS program, including adjusting the amount of contributions, redefining the JKN benefit package based on basic health needs and standard hospitalization, increasing compliance with payment of contributions (especially from the informal sector or Non-Salary Workers/PBPU), and improving JKN governance. In addition, in terms of justice and quality of service, it is also necessary to add additional health facilities in the regions, strengthen service quality, and strengthen the benefits of preventive promotion in First Level Health Facilities (FKTP).

"The Ministry of Health acts as a regulator of health service systems and facilities in Indonesia. All regulations related to JKN-KIS need to be harmonized with the regulations of the President, the Ministry of Health and the Health Office, so they are compatible with the health development framework. We are also ready to work together with BPJS Kesehatan to strengthen cooperation in increasing access to service facilities, financial sustainability, data integration, and other national priorities, such as Covid-19 vaccination. We, Ministry of Health are very supportive of the JKN-KIS program," said Dante.